

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis telah menunjukkan bahwa Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS) Juwana adalah salah satu kelompok masyarakat nelayan pemilik kapal *purse seine* yang mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan secara mandiri dan berkelanjutan dilihat dari perkembangan dari waktu ke waktu dan kebermanfaatan yang dihasilkan. Pemberdayaan yang dilaksanakan sudah memenuhi beberapa aspek dari pemberdayaan, yakni penumbuhan kesadaran dalam diri masyarakat nelayan, peningkatan kapasitas individu dan kelompok nelayan sebagai penunjang keberdayaan, serta peningkatan keberdayaan yang berkelanjutan. Penumbuhan kesadaran dalam Paguyuban MNS Juwana dinilai dari aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan. Anggota paguyuban sudah mengetahui, memahami, dan mampu menganalisis permasalahan terkait inkonsistensi kebijakan pemerintah dan penerimaan informasi yang mengganggu keberlangsungan bisnis usaha perikanan tangkap.

Berkaitan dengan sikap, anggota sudah terlibat dalam proses diskusi, di mana anggota mampu menyampaikan pendapat, menerima dan menghargai keputusan, serta bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan. Adapun terkait tindakan atau perilaku, anggota telah memperlihatkan persepsi dan respons positif terhadap keberadaan Paguyuban MNS Juwana dan kegiatan yang dilakukan,

diwujudkan melalui keterlibatan dalam program pemberdayaan. Namun, keterlibatan aktif anggota di dalam kegiatan Paguyuban MNS Juwana masih belum sepenuhnya optimal.

Peningkatan kapasitas dalam Paguyuban MNS Juwana dilakukan melalui diskusi, edukasi, dan transfer pengetahuan yang membantu anggota meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan komunikasi internal dan komunikasi eksternal dengan pemerintah maupun komunitas nelayan lain, serta meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dalam perumusan kebijakan berkaitan dengan keberlangsungan usaha perikanan tangkap. Tahap peningkatan keberdayaan di Paguyuban MNS Juwana menunjukkan kemandirian yang berkelanjutan dalam mengelola sumber daya, melakukan advokasi kebijakan pemerintah, dan mampu memberikan kebermanfaatn bagi anggota maupun lingkungan sekitar Kabupaten Pati melalui program CSR.

Kegiatan pemberdayaan Paguyuban MNS Juwana didorong oleh adanya motivasi dari anggota yang terlibat dalam pembentukan organisasi dan program yang berjalan, anggaran memadai yang dihimpun dari iuran anggota setiap satu tahun, serta ketersediaan sarana dan prasarana berupa sumber daya manusia (SDM), gedung atau ruangan pertemuan, media komunikasi, dan kemampuan berkomunikasi untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Sementara itu, faktor penghambat dalam pemberdayaan di Paguyuban MNS Juwana adalah kebijaksanaan pemerintah yang dinilai kurang adaptif terhadap kondisi riil usaha perikanan tangkap. Lahirnya paguyuban sendiri merupakan respons terhadap kebijakan yang dianggap kurang berpihak. Oleh karena itu, paguyuban secara

konsisten membangun komunikasi dan melakukan advokasi agar kepentingan anggotanya tetap terakomodasi dan keberlangsungan usaha tetap terjaga.

Pemberdayaan yang dilakukan sejauh ini masih cenderung bersifat elitis di antara anggota Paguyuban MNS Juwana. Namun, dampak positif yang dihasilkan Paguyuban MNS Juwana dapat dirasakan oleh mereka yang berada di luar keanggotaan organisasi baik itu dari aspek finansial berupa distribusi manfaat maupun aspek kebijakan yang mulai memperhatikan pada kondisi riil nelayan pemilik kapal *purse seine*. Pemberdayaan yang dilakukan Paguyuban MNS Juwana secara tidak langsung dapat membawa kesejahteraan bagi anggota.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan, maka dapat diberikan saran dan masukan mengenai hasil penelitian sebagai berikut:

1. Paguyuban MNS Juwana perlu mengadakan program pemberdayaan yang lebih sistematis untuk meningkatkan keterlibatan anggota secara aktif, seperti kegiatan sosialisasi atau pelatihan yang berorientasi kuat pada peningkatan ekonomi anggota. Harapannya, pembentukan program dalam pemberdayaan dapat mendorong keterlibatan anggota secara proaktif. Selain itu, Paguyuban MNS Juwana perlu mengatur hak dan kewajiban anggota secara jelas melalui regulasi internal yang diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan anggota terhadap pengurus serta mendorong rasa memiliki (*sense of belonging*) yang lebih kuat.

2. Mengingat komunikasi eksternal masih didominasi oleh pengurus, perlu dilakukan kaderisasi atau pelibatan anggota dalam forum komunikasi, diskusi, maupun advokasi dengan pemerintah, khususnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu anggota, tetapi juga memperluas representasi kepentingan Paguyuban dalam proses perumusan kebijakan.
3. Program pemberdayaan pemerintah selama ini cenderung berfokus pada nelayan kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan disarankan merancang skema pemberdayaan yang juga mengakomodasi nelayan pemilik kapal skala menengah dan besar, mengingat mereka memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi perikanan nasional dan penyerapan tenaga kerja. Pendekatan ini dapat berupa fasilitasi peningkatan kapasitas manajerial, akses pembiayaan, maupun penguatan jejaring usaha.
4. Keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh komitmen bersama. Oleh karena itu, anggota perlu menumbuhkan kesadaran bahwa paguyuban merupakan wadah kolektif yang keberlanjutannya bergantung pada kontribusi seluruh anggota. Keterlibatan dalam forum diskusi, musyawarah, maupun kegiatan sosial menjadi wujud konkret tanggung jawab tersebut.